

# BAB I

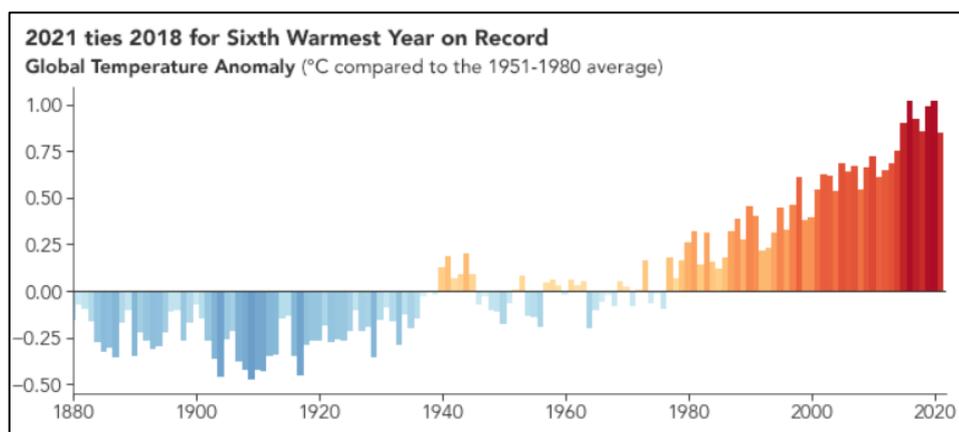
## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Memasuki tahun ke-2 sejak ditetapkan sebagai krisis kesehatan global pada Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO), pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Mutasi materi genetik virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 terus melahirkan varian baru yang secara simultan menginfeksi manusia tanpa batasan usia, waktu, ataupun status. Tak butuh waktu lama, *multiplier effect* (efek berganda) dari pandemi telah memperburuk kondisi krisis multidimensional saat ini yang kerusakannya bersifat global, kolektif, dan masif. Satu yang paling mengancam dan mematikan adalah krisis perubahan iklim global (*global climate change* atau *climate crisis*).

Jauh sebelum pandemi COVID-19 menginfeksi seluruh dunia, krisis perubahan iklim hadir lebih dulu sebagai ancaman global. Pernyataan ini didasarkan pada temuan NASA's Goddard Institute for Space Studies (2021) yang menyatakan bahwa suhu bumi naik sebesar 1.1°C atau 1.9°F dibandingkan tahun 1880, di mana kenaikan paling ekstrim terjadi pada tahun 1975, yakni 0.15-0.20°C per-dekade (NASA Earth Observatory, 2022).

Gambar 5.1. Perbandingan Suhu Rata-Rata Bumi (1880-2020)



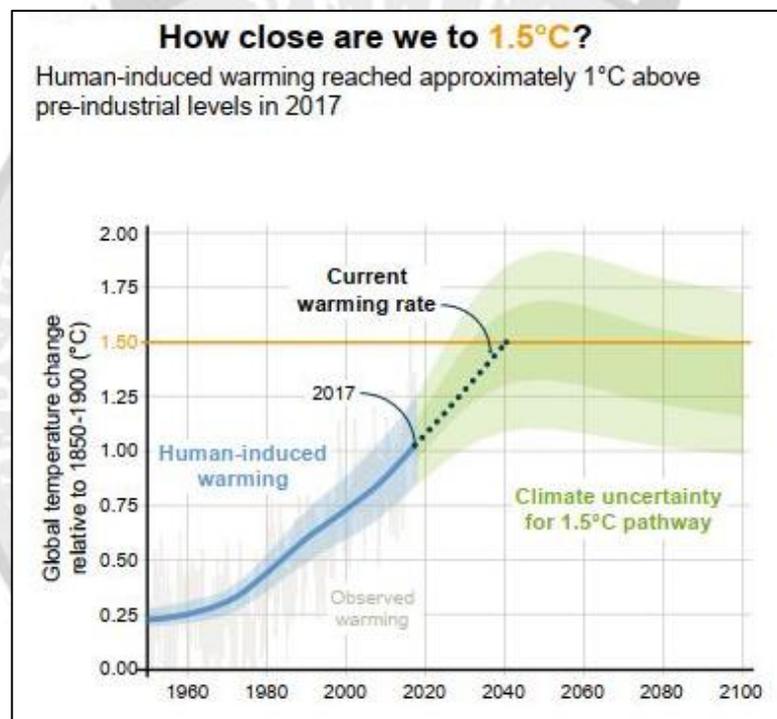
Sumber: (NASA Earth Observatory, 2022)

Dibawah skenario emisi tinggi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – badan ilmu iklim terbesar di dunia, suhu bumi diperkirakan naik menembus 4.4°C pada tahun 2100 (Masson-Delmotte, 2021). Padahal, kenaikan 2°C saja bagaikan ‘vonis mati’ bagi eksistensi negara kepulauan kecil (*Small Island Developing States/SIDS*) di Pasifik dan negara miskin (*Least Developed Countries/LDCs*) di Afrika (UKCOP26, 2021). Sementara bagi negara maju dan berkembang, berpotensi mempercepat laju kepunahan spesies flora-fauna, memicu kenaikan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, juga munculnya varian baru penyakit menular (Sayyidati, 2017).

Tak ayal, sejumlah ilmuwan berasumsi bahwa kemunculan varian baru virus SARS-CoV-2 sebagai pemantik krisis kesehatan global (pandemi) merupakan *spillover effect* (efek limpahan) dari krisis perubahan iklim global. Namun, di sisi lain, ekstrimisme perilaku manusia selama pandemi juga berkontribusi signifikan dalam mempercepat laju krisis iklim. Peralihan ledakan konsumsi sampah medis dan non-medis, terutama sampah yang bersifat *single-use* atau *disposable*, terjadi serentak di seluruh dunia hingga akhirnya membebani lingkungan.

Dewasa ini, laporan IPCC (2021) mengklaim bahwa suhu bumi abad ke-21 relatif lebih hangat sekitar 0.8-1.3°C dibanding abad ke-18, tepatnya di masa praindustri (*pre-industrial time*) tahun 1800-1850. Jika diabaikan, dalam kurun waktu dua dekade (2021-2040), suhu bumi akan naik drastis melampaui ambang batas 1.5°C yang menandai perjalanan bumi menuju puncak krisis iklim global (Masson-Delmotte, 2021), sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.2.

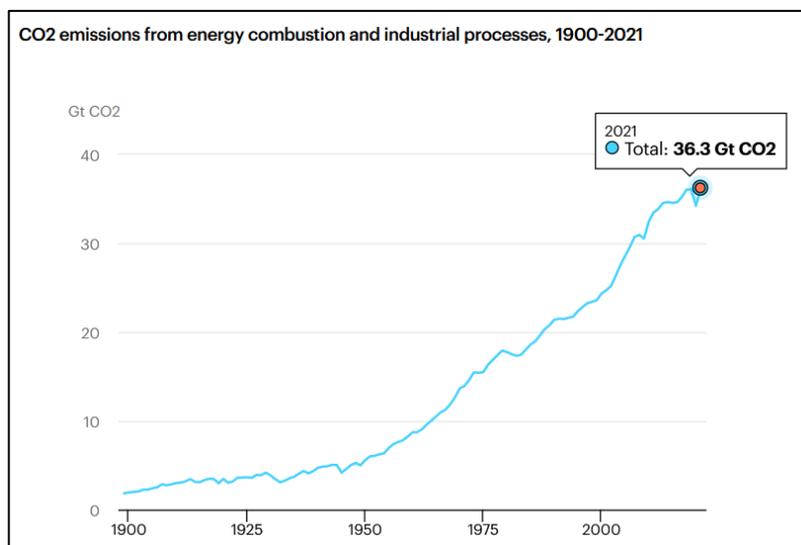
Gambar 1.6. Prediksi Puncak Krisis Iklim



Sumber: (IPCC, 2019)

Laporan IPCC tersebut seakan memvalidasi fakta di lapangan bahwa laju kerusakan lingkungan – mengacu pada indikator emisi CO<sub>2</sub> – memang bergerak secara eksponensial sejak era Revolusi Industri dimulai pada abad ke-18, sebagaimana detail pada Gambar 1.3 dibawah ini.

Gambar 1.7. Total Pelepasan Emisi CO<sub>2</sub> Global dari aktivitas industri



Sumber: (IEA, 2022)

Dimana ragam inovasi progresif – mulai dari penemuan sistem ‘mekanisasi’ hingga ‘otomatisasi, komputerisasi, dan *internet of things* (IoT)’ – notabene menerapkan model ekonomi linier berpola ‘*take-make-waste*’ dalam rangkaian aktivitas industrinya. Sejak itu, pola ‘*take-make-waste*’ menjadi standar baku operasional industri di mayoritas negara maju selaku negara superior dalam konstelasi struktur politik global menurut perspektif konstruktivisme, dan standar baku operasional ekstraksi sumber daya material di negara miskin dan berkembang selaku negara inferior.

Secara teoretis, model ekonomi linier merupakan salah satu elemen kunci dari sistem ekonomi neoliberal/kapitalis yang muncul sebagai pengetahuan baru (*new social knowledge*) di era Revolusi Industri. Dalam perkembangannya, ide-ide atau elemen dari sistem ekonomi neoliberal/ kapitalis ditransmisikan oleh negara superior ke negara inferior melalui fenomena globalisasi ekonomi. Tujuannya, menguasai sumber daya material sekaligus sistem perekonomian negara inferior.

Tanpa indikasi curiga, negara inferior mereplikasi dan memodifikasi ide-ide dari sistem ekonomi neoliberal/kapitalis tersebut ke dalam sistem perekonomian nasionalnya. Tak hanya sekedar adopsi model ekonomi linier sebagai standar baku aktivitas produksi dan konsumsi, tetapi juga replikasi paradigma tentang konsep pembangunan ekonomi nasional. Negara inferior terjebak dalam alur pikir negara superior dan berbagi pemahaman yang sama tentang konsep pembangunan ekonomi bahwa (i) kekuatan ekonomi suatu negara hanya dapat dibangun dari sektor industri atau manufaktur, bukan dari sektor non-industri; dan (ii) angka pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tolok ukur utama keberhasilan pembangunan, bukan angka kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, skema pembangunan nasional di negara inferior masih sangat konvensional karena mengacu pada model *single bottom line development* – bukan *double/triple bottom line* sebagaimana mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam arti, kepentingan ekonomi menjadi prioritas utama tujuan nasional dimana pelaku industri/usaha adalah aktor ekonomi sentral yang harus diakomodasi kebutuhannya. Kondisi ini seakan menjustifikasi keutamaan hak absolut manusia atas alam daripada kesetaraan antara hak manusia dengan hak alam itu sendiri (Sessions, 1987).

Bagi para penstudi ilmu Hubungan Internasional, diskursus diatas memantik sejumlah pertanyaan dan kesadaran baru (*awareness*). Hingga pada era 1960-an, berkembang aliran teori kritis kontemporer yang mengkritisi dominasi dari ide neoliberalisme/kapitalisme (*social knowledge*) dalam sistem ekonomi global (Jackson & Sorensen, 2009). Momentum inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran

teori politik hijau atau *green political theory*. Setidaknya terdapat dua argumen utama dari teori politik hijau. Pertama, menolak perspektif *human-centred* atau antroposentris yang memberikan validasi pada keutamaan hak absolut manusia atas alam beserta isinya, dimana kepentingan materialistik manusia (ekonomi/militer) lebih didahulukan daripada kepentingan ekologi (Eckersley, 1992). Kedua, menolak *status quo* rezim internasional atau struktur/tatanan dunia kontemporer yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, industrialisasi, dan konsumerisme yang merupakan akar masalah kerusakan ekologi (Connelly & Smith, 2003).

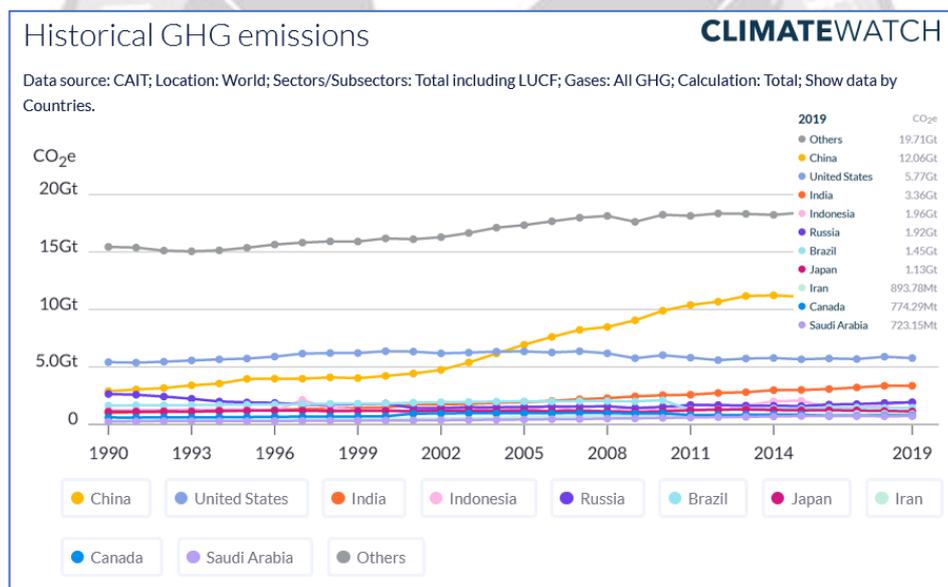
Berpijak pada uraian dua argumen di atas, peneliti berupaya membedah akar masalah struktural dari isu lingkungan hidup global yang selama dua dekade terakhir menjadi momok bagi negara inferior. Di mana dominasi kekuatan material dan ideasional dari negara superior sangat menentukan pola, warna dan nuansa interaksi hierarkis antar aktor dalam suatu rezim internasional. Hasilnya, terbentuk polarisasi dan diskriminasi identitas dimana negara superior bertindak sebagai struktur dan negara inferior sebagai agensi, sehingga norma dan aturan (*rules and procedures*) yang berlaku selalu disesuaikan dengan kepentingan dari para negara superior.

Dalam rangka mengatasi masalah krisis iklim global, keberadaan pola, warna dan nuansa interaksi hierarkis yang demikian tidak lagi efektif dijadikan dasar pembagian tugas dan tanggung jawab diantara para aktor. Pasalnya, dampak negatif krisis iklim tidak semata merugikan negara inferior yang relatif memiliki daya dukung minimal, tetapi juga negara superior yang memiliki daya dukung maksimal. Untuk itu, keduanya harus saling berkolaborasi menjalankan peran masing-masing

sesuai kemampuan daya dukung yang dimilikinya untuk mencegah terjadinya puncak krisis.

Sebagai negara inferior penyumbang emisi CO<sub>2</sub> peringkat ke-4 dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat dan India (detail pada Gambar 1.4), Indonesia memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar dari negara inferior lain untuk mampu berkontribusi aktif mengarahkan strategi rehabilitasi, adaptasi dan mitigasi, sekaligus memimpin aksi implementasi global dalam rangka menghentikan laju krisis iklim. Besarnya kewajiban Indonesia tersebut merupakan konsekuensi logis yang tak terhindarkan.

Gambar 1.8. The World's Top 10 Emitters



Sumber: (Friedrich, Ge, & Pickens, 2020)

Salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia terlihat dari keseriusan komitmen Indonesia untuk mencapai target besaran kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia menuju Nationally Determined Contribution (NDC) 2030. Dimulai dari komitmen penurunan emisi GRK *unconditional* (dengan usaha sendiri) sebesar 26% dan *conditional* (dengan bantuan internasional) sebesar 41%,

dibanding skenario Business as Usual (BAU), hingga tahun 2020, yang disampaikan dalam Conference of the Parties United Nations Framework Convention on Climate Change ke -15 tahun 2009 atau dikenal sebagai COP-15 UNFCCC.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia mentranslasikan komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (GRK) yang diperkuat melalui dokumen NDC pertama tahun 2016 (KemenLHK, 2017). Adapun progres realisasi capaian Indonesia untuk mengurangi Emisi GRK Nasional sejak tahun 2010 hingga 2019 terlihat dalam tabel 1.1, sementara capaian sektoral terhadap target CM1 di tahun 2019 dirinci dalam tabel 1.2.

Table 1.1 Profil Capaian Pengurangan Emisi GRK Nasional terhadap Target Pengurangan Emisi GRK pada CM 1 di tahun 2010-2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BAU (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	1.334,00	1.519,85	1.569,38	1.611,30	1.671,00	1.702,37	1.768,91	1.820,49	1.862,96	1.911,40
ER CM1 (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	1.334,00	1.332,00	1.333,00	1.338,00	1.347,00	1.359,00	1.375,00	1.394,00	1.418,00	1.445,58
Target ER CM1 (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	-	187,85	236,38	273,30	324,00	343,37	393,91	426,49	444,96	465,82
Inventory (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	809,98	1.054,08	1.244,58	1.331,41	1.508,97	2.374,40	1.335,52	1.353,85	1.615,57	1.866,55
Persentase Target ER terhadap CM1		247%	137,41%	102,41%	50,01%	-195,72%	110,02%	109,41%	55,60%	9,63%

Sumber: (KemenLHK, 2021)

Table 1.2 Capaian Pengurangan Emisi GRK Sektoral Terhadap Target CM1 di tahun 2019

	ENERGI	IPPU	LIMBAH	PERTANIAN	KEHUTANAN	TOTAL
BAU (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	845,48	56,46	134,81	115,46	759,20	1.911,40
ER CM1 (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	689,38	54,52	133,31	111,55	456,81	1.445,58
Target ER CM1 (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	156,09	1,94	1,50	3,91	302,38	465,82
Inventory (Juta ton CO <sub>2</sub> e)	638,81	60,18	134,12	108,59	924,85	1.866,55
Persentase Target ER terhadap CM1	132%	-191,85%	45,91%	175,90%	-54,78%	9,63%

Sumber: (KemenLHK, 2021)

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kinerja Indonesia periode 2019 belum optimal dibanding 10 periode terakhir, terkecuali 2015, di mana target pengurangan

emisi GRK hanya tercapai 9.63% atau 44.85 juta ton CO<sub>2</sub>e dari total target pengurangan emisi (*emission reduction/ER*) CM1 (*Counter Measure*) sebesar 465.82 juta ton CO<sub>2</sub>e. Untuk itu, Indonesia berupaya mengejar ketertinggalannya dengan mengadopsi elemen kunci model ekonomi hijau atau '*green economic model*' ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Upaya tersebut penting karena paska 2020, target komitmen Indonesia bertambah menjadi 29% (*unconditional*) atau 834 juta ton CO<sub>2</sub>e CM1 dan 41% (*conditional*) atau 1,081 juta ton CO<sub>2</sub>e CM2, dibandingkan skenario BAU hingga 2030.

Guna mendukung tercapainya target RPJMN 2020-2024 berbasis skema *triple bottom line development*, Indonesia mengemas aspek *environmental*, *social*, dan *governance* (ESG) dari model ekonomi hijau ke dalam konsep '*green growth*'. Dengan menjadikan target penurunan angka deforestasi dan emisi karbon sebagai sumber daya pertumbuhan ekonomi yang baru, konsep '*green growth*' kemudian ditranslasikan menjadi Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Program/GGP*). Tujuan utamanya adalah membangun struktur ekonomi baru yang lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif dengan bertumpu pada tiga sektor prioritas, yakni: energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan (IGGP, 2022).

Sektor energi berkelanjutan menjadi prioritas utama Indonesia saat ini karena merupakan prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas industri/ ekonomi, sekaligus menanggung presentase target pengurangan emisi GRK nasional yang cukup besar, yakni 11% dari total 29% hingga 2030. Untuk mencapai target 11%, di tingkat

nasional, Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) telah melakukan 5 (lima) kelompok aksi mitigasi, berupa: (i) efisiensi energi; (ii) energi baru terbarukan; (iii) bahan bakar rendah karbon; (iv) penggunaan teknologi pembangkit bersih; dan (v) kegiatan lainnya. Sedangkan di tingkat global, Indonesia memasukkan agenda Transisi Energi sebagai satu dari tiga sektor prioritas global – selain isu penguatan arsitektur kesehatan global dan transformasi digital – yang menjadi kunci pemulihan ekonomi global paska pandemi COVID-19 (Kemenlu RI, 2022) dengan memanfaatkan momentum Presidensi G20 (periode 2021-2022) bertema “*Recover Together, Recover Stronger*”.

Melalui agenda Transisi Energi, Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk segera memulai proses transisi dari energi tak terbarukan (*fossil-fuel*) menuju energi terbarukan (*non-fossil fuel*) dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan (*justice*) dan keterjangkauan (*affordable*). Tujuannya, memastikan masa depan bumi yang hijau dan berkelanjutan demi menjaga eksistensi peradaban manusia. Dengan demikian, agenda Transisi Energi menjadi salah satu wujud tanggung jawab Indonesia untuk memenuhi kewajibannya selaku negara penyumbang emisi CO<sub>2</sub> ke-4 dunia.

Ajakan Indonesia tersebut tidak sebatas untuk negara anggota G20, tetapi juga 120 negara anggota PBB. Hasilnya, pada pertemuan COP-26 UNFCC tanggal 31 Okt-12 Nov 2021 di Glasgow, Skotlandia, disepakati the Glasgow Climate Pact yang berisi penegasan komitmen rehabilitasi, adaptasi, dan mitigasi krisis iklim yang menekankan pada pentingnya sentralitas dan solidaritas aktor transnasional

(aktor pemerintah dan non-pemerintah) untuk terlibat dalam upaya mengatasi dan mencegah terjadinya puncak krisis iklim, sekaligus membangun masa depan baru paska COVID-19. Tujuannya, menciptakan dunia yang lebih ‘hijau’ dan adaptif dalam menghadapi ancaman krisis multidimensi lain di masa mendatang.

Dalam konteks ekonomi, visi dari the Glasgow Climate Pact di atas sejalan dengan cita-cita Sekjen PBB Antonio Guterres yang berulang kali disampaikan pada berbagai forum pertemuan *high level* bahwa “*we need a green economy not a grey economy*” (PAGE, 2019). Upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi global yang lebih ‘hijau’ bukan pekerjaan mudah karena perlu kerjasama multi-aktor dari multi-sektor yang tersebar di multi-nasional, mulai dari level elit (struktur) hingga individu (agensi). Selain itu, perlu adanya dukungan instrumen kebijakan, utamanya kebijakan ekonomi makro, yang adaptif dan responsif.

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan BAU di sektor industri tidak lagi relevan, baik di masa ini maupun mendatang maka perlu segera digantikan dengan pendekatan alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, diperlukan pendekatan ekonomi alternatif baru yang tinggi efisiensi pemakaian bahan baku material dan energi. Untuk itu, upaya transformasi sistem ekonomi global menuju model ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan melainkan keharusan (*new social practices*).

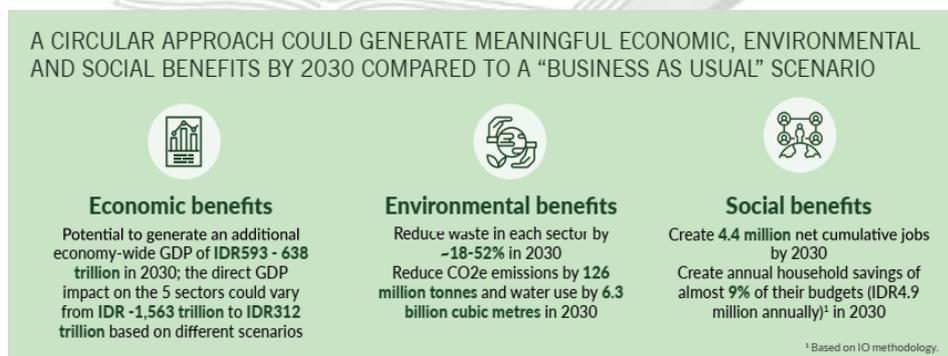
Namun demikian, mayoritas negara inferior masih kesulitan untuk memulai proses transformasi tersebut. Pasalnya, struktur ekonomi nasional mereka masih bertumpu pada sektor industri dan perdagangan ekstraktif. Di mana upaya pengejaran tujuan ekonomi (*economic growth*) yang bersumber dari sektor industri

dan perdagangan ekstraktif harus dibayar dengan kerusakan lingkungan. Di titik inilah, *green economic model* – berbasis model ekonomi sirkular (*new social knowledge*) – hadir sebagai opsi yang *feasible* dan *executable* untuk menjembatani upaya pencapaian kedua kepentingan tersebut (Lieder & Rashid, 2016).

Optimisme atas keunggulan implementasi *green economic model* telah divalidasi oleh Pemerintah Indonesia dan Denmark, juga UNDP Indonesia melalui hasil penelitian kolaboratif yang diinisiasi sejak tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis potensi ekonomi, sosial dan lingkungan dari keberhasilan penerapan model ekonomi sirkular di Indonesia, utamanya pada 5 sektor industri prioritas, yaitu: i) makanan dan minuman; ii) konstruksi; iii) elektronik; iv) tekstil; dan v) plastik.

Hasilnya, dari sisi ekonomi - Indonesia berpotensi menghasilkan tambahan Gross Domestic Product (GDP) sekitar 593-642 T hingga 2030; dari sisi sosial - berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru hingga 2030; dari sisi lingkungan - berpotensi menurunkan emisi CO<sub>2</sub> ekuivalen sekitar 126 juta ton hingga tahun 2030. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.5 dibawah ini.

Gambar 1.9. Potensi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dari Ekonomi Sirkular di Indonesia



Sumber: BAPPENAS, 2021

Sebagai pembandingan, penerapan model ekonomi sirkular di Denmark berpeluang meningkatkan angka Product Domestic Bruto (PDB) lebih dari 7 miliar USD dengan ekspor bersih sebesar 3-6%, dan menurunkan emisi CO<sub>2</sub> sebesar 3-7% hingga tahun 2030. Kedua data tersebut menggambarkan besarnya optimisme positif yang dihadirkan oleh model ekonomi sirkular bagi perbaikan daya tahan atau resiliensi ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (BAPPENAS et.al, 2021).

Selanjutnya, peneliti menggunakan hasil temuan data di atas sebagai pijakan awal untuk mencari objek studi kasus yang relevan di Indonesia. Data temuan mengindikasikan bahwa penerapan model ekonomi sirkular pada (minimal satu) sektor industri prioritas Indonesia, diproyeksikan mampu berkontribusi signifikan dalam upaya nasional mencapai target pengurangan emisi CO<sub>2</sub>. Apalagi jika sektor industri yang dipilih termasuk kategori industri boros energi sehingga mudah diintervensi KemenESDM melalui program aksi mitigasi nasional.

Mengacu pada uraian di atas, peneliti memilih sektor industri makanan/minuman sebagai fokus penelitian karena dalam aktivitas produksinya membutuhkan suplai energi dan bahan baku dalam jumlah besar karena berkelanjutan tingkat permintaan, meski akhirnya tingkat efisiensi proses produksi yang rendah menyisakan banyak limbah energi dan bahan baku. Beranjak dari sini, peneliti coba menelaah jenis bahan baku produksi seperti apa yang media budidayanya berbasis ekosistem alami. Dengan harapan, pemanfaatan ekosistem alam mampu bantu pemerintah dalam upaya pengurangan angka emisi GRK atau setidaknya mencegah kenaikan angka emisi.

Berdasarkan analisis kualitatif yang diperkuat oleh data temuan kuantitatif dalam tabel 1.1 dan 1.2 di atas, pilihan peneliti jatuh pada ekosistem alami lahan gambut yang dinilai efektif mengurangi emisi GRK. Pasalnya, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut menjadi kontributor terbesar bagi kenaikan angka emisi GRK pada tahun 2015 dan 2019, di mana capaian pengurangan emisi GRK nasional tahun 2015 menyentuh angka -195.72% sementara capaian tahun 2019 berada di angka positif paling rendah yakni 9.63%. Kontribusi capaian terbesar berasal dari sektor kehutanan sebesar 924.85 juta ton CO<sub>2</sub>e yang disusul sektor energi sebesar 638.81 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2019 (KemenLHK, 2021).

Selanjutnya, peneliti menelaah lebih jauh profil para pelaku industri nasional yang bahan baku produksinya memanfaatkan hasil budidaya pertanian/perikanan di lahan gambut atau dikenal sebagai komoditas ramah gambut. Diutamakan pelaku industri yang telah menerapkan model ekonomi hijau berpola sirkular. Dari hasil penelaahan, profil PT ASL sangat sesuai dengan kriteria peneliti. Capaian prestasinya sangat representatif untuk menggambarkan peran aktor non-pemerintah di tingkat lokal yang mampu berkontribusi signifikan dalam mendorong transformasi kebijakan pembangunan Indonesia menuju skema *triple bottom line development*, sekaligus sistem perekonomian global menuju ekonomi berkelanjutan dalam rangka mengatasi krisis iklim global.

Harapannya, kehadiran PT ASL mampu menjawab keraguan komunitas internasional, khususnya *policymakers* dan *stakeholders*, akan kemampuan aktor non-pemerintah di tingkat lokal dalam mendukung cita-cita pembangunan global. Sekaligus menunjukkan bahwa aksi-implementasi yang dilakukan struktur di

tingkat global ternyata mampu memberikan manfaat langsung bagi agensi di tingkat lokal, tidak lagi sebatas retorika pemimpin elit atau *the speech act* yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan angka. Dengan catatan, praktik ekonomi sirkular konsisten diterapkan dalam aktivitas keseharian agensi atau dikenal dengan istilah praktik sosial (*social practices*).

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, teridentifikasi akar masalah kerusakan lingkungan hidup global pemicu krisis iklim adalah penerapan pola linier (*social knowledge*) dalam rangkaian aktivitas industri yang meningkat sejak dimulainya Revolusi Industri abad 18 hingga saat ini. Pasalnya, desain mekanistik dari pola linier bersifat degeneratif/merusak karena menghabiskan banyak sumber daya – baik berupa materi maupun energi, juga menghasilkan residu limbah yang tidak dapat diolah kembali oleh alam, utamanya berupa karbondioksida (CO<sub>2</sub>) dan zat polutan emisi gas rumah kaca lainnya.

Namun, justru proses produksi berpola linier ini yang direplikasi dan dipatenkan secara masif sebagai standar baku umum di seluruh sektor industri dalam sistem ekonomi neoliberal/kapitalis (*social practices*). Maka diperlukan aksi bersama, baik di tingkat global, nasional, dan lokal, untuk mentransformasi sistem ekonomi global dari ekonomi neoliberal/kapitalis menuju ekonomi ‘hijau’ atau berkelanjutan guna menghentikan laju krisis. Tentu bukan perkara mudah karena dibutuhkan kerjasama sinergis antar aktor di berbagai sektor yang tersebar di

seluruh dunia. Tak hanya aktor yang berada di level elit (struktur) tetapi juga di unit terkecil (agensi).

Dengan menerapkan konsep kunci dari konstruktivisme sebagai instrumen analisis, peneliti coba menelusuri satu persatu tahapan dari proses pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) yang berlangsung di alam sadar para aktor, baik agensi maupun struktur. Proses tersebut digunakan untuk mengawal upaya transformasi sistem ekonomi global dari neoliberal menuju berkelanjutan. Melalui studi kasus PT Alam Siak Lestari (ASL), peneliti coba menelusuri proses *shifting paradigm* yang dialami aktor non-pemerintah di tingkat lokal yang magnitude signifikansi perannya seringkali diragukan.

Alasan utama pemilihan studi kasus dari Indonesia didasarkan pada intensi peneliti untuk berkontribusi secara akademis dalam menjembatani dilema pembangunan yang dialami negara inferior. Caranya, menawarkan sebuah ide baru untuk diimplementasi dan diaplikasi secara terpadu oleh para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ide dimaksud berupa strategi untuk mentransformasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional dari skema *single bottom line* menuju skema *triple bottom line*, dengan menitikberatkan pada signifikansi peran aktor non-pemerintah (*non-government actor*) di tingkat lokal atau sub-nasional.

Jika berhasil, Indonesia menjadi pioneer di antara negara inferior yang memberikan contoh *best practices* kepada negara inferior lain untuk ikut berkontribusi nyata dalam aksi global memerangi krisis iklim. Kondisi ini akan memudahkan kelompok negara inferior untuk menyuarakan kepentingannya dalam

rezim internasional sehingga aturan usang dan norma diskriminatif dapat segera direformasi demi tercipta sistem perekonomian global yang lebih ‘hijau’ di masa depan.

Pada umumnya, proses *shifting paradigm* dimulai dari munculnya kesadaran baru di alam sadar negara inferior (agensi) bahwa sistem nilai dan norma yang diadopsi dalam rezim internasional saat ini sarat dengan dominasi kepentingan negara superior (struktur) sehingga perlu segera direformasi. Kesadaran tersebut saling dipertukarkan (*shared ideas*) diantara agensi melalui proses *intersubjective understanding*. Hasilnya, tercapai kesepakatan baru (*new social knowledge*) mengenai sistem nilai dan norma yang masih relevan ataupun yang telah usang. Kesepakatan ini berdampak pada lahirnya identitas baru (*new social identity*) di antara agensi dimana kelompok yang setuju menjadi bagian dari ‘kami’, sementara sisanya menjadi ‘mereka’.

Dalam identitas baru langsung melekat kepentingan baru (*shared interests*), yaitu menciptakan sistem ekonomi global yang lebih ‘hijau’ sebagai salah satu solusi mengatasi krisis iklim global. Akan tetapi, motivasi yang membentuk kepentingan baru sangat ditentukan oleh intensi spesifik setiap agensi yang umumnya terkait dengan *beliefs system*. Intensi dimaksud berupa semangat ambil bagian dalam upaya bersama untuk mengatasi krisis iklim demi keberlangsungan hidup manusia atau *common goods* di masa kini dan masa depan (Clunan, 2009). Demi memastikan tercapainya tujuan tersebut, intensi setiap aktor harus dimanifestasikan dan dipraktikkan secara kontinu, intens, dan masif (*practical*

*consciousness*) dalam keseharian hingga membentuk praktik kebiasaan yang terinstitusionalisasi menjadi norma (*social practices*).

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti tertarik mengajukan dua rumusan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hadirnya model ekonomi hijau (*green economic model*) sebagai pengetahuan dan praktik sosial baru (*new social knowledge* dan *practices*) dalam kebijakan ekonomi nasional Indonesia, menyikapi isu krisis iklim global?
2. Bagaimana praktik dari model ekonomi hijau berpola sirkular (*new social knowledge*) dioperasionalkan melalui studi kasus PT Alam Siak Lestari (ASL) sebagai bagian dari solusi krisis iklim global?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk menelusuri proses *shifting paradigm* yang dialami aktor non-pemerintah di tingkat lokal melalui dinamika interaksi dialog berbasis *intersubjective understanding*. Tujuannya, mereplikasi proses tersebut secara komprehensif kepada sebanyak mungkin struktur dan agensi yang terdiri dari aktor non-pemerintah di seluruh dunia.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa (i) wawancara (*interview*) atau eksplorasi persepsi, dan (ii) review dokumentasi (*document review*) atau eksplorasi literature, peneliti berupaya mengidentifikasi bagaimana bentuk aplikasi dari konsep kunci konstruktivisme dalam menjelaskan proses pergeseran

paradigma (*shifting paradigm*) di antara struktur dan agensi, melalui studi kasus PT Alam Siak Lestari (ASL).

#### 1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Akademis: hasil penelitian yang mengangkat isu terkini dan faktual tentang aplikasi model ekonomi hijau di Indonesia oleh aktor non-pemerintah (*non-government actors*) di level lokal atau sub-nasional diharapkan mampu meyakinkan pada penstudi ilmu Hubungan Internasional, utamanya di Indonesia, bahwa aktor non-pemerintah di level lokal mampu berkontribusi secara signifikan untuk menyelesaikan masalah pemerintah global atau mewujudkan cita-cita global, selama proses pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dipastikan terakumulasi menjadi praktik sosial (*social practice*) sehari-hari.
2. Manfaat Praktis: hasil penelitian yang berupa *policy-oriented research* diharapkan mampu menjadi salah satu referensi atau sumber rekomendasi empiris bagi para pembuat kebijakan (*policymaker*) di Indonesia dalam rangka mentransformasi skema pembangunan nasionalnya ke arah *triple bottom line development*, sebagaimana mandat PBB yang menjadi cita-cita global

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan, disusun sistematika penulisan bagian utama penelitian yang terdiri atas bab dan sub-bab, sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian latar belakang pemilihan judul penelitian yang didalamnya menyoroti suatu pokok permasalahan tertentu. Masalah kemudian diidentifikasi dan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yang hasil temuannya nanti memiliki tujuan dan kegunaan akademis juga praktis. Adapun struktur pelaporan hasil penelitian disusun dalam sistematika penelitian.

#### BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini mencakup sub-bab (1) tinjauan pustaka yang mengulas studi ilmiah terdahulu yang dikelompokkan dalam tiga tema utama, yaitu: (i) pro-kontra pola ekonomi linier vs ekonomi sirkular; (ii) perkembangan '*green economic model*', dan (iii) *shifting paradigm* dari '*black/brown economic model*' berpola linier ke '*green economic model*' berpola sirkular; (2) kerangka teoretis yang berisi instrumen analisis penelitian, yaitu: perspektif konstruktivisme termasuk didalamnya konsep mengenai '*emancipatory knowledge constitutive interest*' dan '*structuration theory*', juga beberapa konsep utama yang akan digunakan, seperti: model ekonomi hijau dan model ekonomi

hitam/coklat, termasuk uraian perbedaan diantara keduanya; keduanya dikemas dalam bentuk (3) kerangka analisis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis, sifat dan ragam dari metode penelitian yang dipilih, berikut alasan pemilihannya yang didasarkan pada kekhususan dan kompleksitas interrelasi fakta yang terdapat dalam objek studi kasus yang diteliti. Terdiri dari: (i) ruang lingkup penelitian; (ii) metode penelitian; (iii) jenis dan teknik pengumpulan data; dan (iv) teknik verifikasi dan analisis data.

### **BAB IV ANALISA**

Bab ini berisi hasil interpretasi atas temuan penelitian yang disusun secara sistematis dalam bentuk argumentasi analitis, kritis dan rasional. Tujuannya, memudahkan peneliti dalam menjelaskan runut alur pikir konstruktivisme yang dioperasionisasikan melalui contoh studi kasus – sebagaimana detail rumusan dua pertanyaan penelitian yang diajukan, serta menyederhanakan proses memahami dari sisi pembaca.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari simpulan atas jawaban dari setiap pertanyaan penelitian yang dilengkapi dengan beberapa poin saran atau masukan bersifat normatif-aplikatif.